

Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Instansi Pemerintah

Izzati Rizal

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, Indonesia
izzati.rizal@stikomprosia.ac.id

Submitted: 16th May 2025 | **Edited:** 30th June 2025 | **Issued:** 01st July 2025

Cited on: Rizal, I. (2025). Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Instansi Pemerintah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 1183-1192.

ABSTRACT

In the context of increasing demands for transparency and accountability in public sector financial management, understanding how management control systems influence financial accountability has become crucial particularly for State Universities with Legal Entity status (PTNBH), which operate under semi-autonomous governance with complex financial mechanisms. This study aims to examine the effect of management control systems on enhancing financial accountability in a government institution functioning as a PTNBH. A mixed methods approach was employed, involving 100 quantitative respondents through structured questionnaires and 10 qualitative informants via in-depth interviews. The quantitative analysis reveals a positive and significant effect of management control systems on financial accountability, with a regression coefficient of 0.63 ($p < 0.001$). The qualitative findings support the quantitative results, highlighting the essential roles of leadership commitment, human resource competence, and effective use of information technology in improving control system effectiveness. The novelty of this study lies in its focus on the PTNBH governance model, which introduces unique accountability challenges. The research suggests that strengthening human resource capacity and developing information technology infrastructure are strategic measures to enhance financial accountability. Future studies are recommended to investigate the role of organizational culture and to develop digital-based control system models tailored to higher education institutions.

Keywords: Management Control System, Financial Accountability, PTNBH, Mixed Methods, Information Technology

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sektor publik di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi, telah mendorong kebutuhan akan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Pemerintah Indonesia merespons tuntutan ini melalui regulasi strategis seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal sebagai bagian dari good governance (Kementerian Keuangan, 2003; Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama pada instansi pemerintah yang telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yang memiliki karakteristik otonomi dan kompleksitas keuangan yang tinggi

(Firmansyah & Wahyudi, 2021; Siregar et al., 2020). Kompleksitas ini menuntut adanya sistem pengendalian manajemen yang mampu menyesuaikan dengan dinamika tata kelola keuangan berbasis kinerja serta teknologi informasi.

Transformasi kelembagaan menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) merepresentasikan pergeseran dari model birokrasi administratif tradisional ke arah tata kelola yang lebih otonom, fleksibel, dan profesional (Putra & Wahyuni, 2019). Status hukum ini memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, serta pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal (Hidayat & Sari, 2022). Namun, di balik keleluasaan tersebut, akuntabilitas keuangan kepada negara dan publik justru menjadi semakin penting dan kompleks. Sejumlah studi menunjukkan bahwa fleksibilitas kelembagaan yang tidak diiringi dengan penguatan sistem pengendalian manajemen yang adaptif dan berbasis risiko dapat menimbulkan inefisiensi, lemahnya pengawasan, serta meningkatnya potensi penyimpangan keuangan (Yuliana & Setiawan, 2023; Rahmawati et al., 2020). Oleh karena itu, pembangunan sistem kontrol internal yang responsif terhadap dinamika PTNBH menjadi krusial untuk menjamin transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana sistem pengendalian manajemen berfungsi dalam menjaga keseimbangan antara otonomi kelembagaan dan akuntabilitas publik. Banyak kegagalan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di sektor publik justru disebabkan oleh absennya kerangka pengendalian manajerial yang mampu merespons dinamika operasional lembaga secara efektif (Dewi & Syakhroza, 2020; Mustika et al., 2021). Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks PTNBH yang secara struktural memiliki kebebasan tinggi namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola publik.

Meskipun sejumlah studi telah membahas hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan di sektor publik, mayoritas penelitian tersebut masih terfokus pada institusi pemerintah konvensional seperti pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga non-perguruan tinggi (Fitriani & Maulana, 2019; Lestari & Prasetyo, 2021). Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti efektivitas SPIP atau audit internal dalam meningkatkan transparansi keuangan, namun belum menyentuh secara mendalam konteks kelembagaan yang lebih kompleks dan otonom seperti Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Studi yang secara spesifik menelaah peran sistem pengendalian manajemen dalam konteks PTNBH masih sangat terbatas, baik secara jumlah maupun kedalaman analisisnya. Terlebih lagi, pendekatan yang digunakan sebagian besar bersifat kuantitatif atau deskriptif semata, sementara integrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara simultan masih jarang dilakukan (Ramadani & Pertiwi, 2022; Nugroho & Hasanah, 2023). Padahal, pendekatan campuran dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap bagaimana sistem pengendalian manajemen berfungsi dalam merespons dinamika otonomi kelembagaan sekaligus menjaga akuntabilitas publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana sistem pengendalian manajemen berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan PTNBH. Fokus utama diarahkan pada identifikasi komponen pengendalian yang paling berpengaruh, serta bagaimana integrasi antara sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan digital mampu memperkuat transparansi dan keandalan pelaporan keuangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menjawab pertanyaan penting: sejauh mana efektivitas

sistem pengendalian manajemen dalam menunjang akuntabilitas keuangan pada institusi yang telah memperoleh otonomi penuh.

Selain berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan literatur pengendalian manajemen di sektor publik, penelitian ini juga memiliki nilai praktis dan kebijakan. Hasil studi ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi pengelola keuangan dan pimpinan PTNBH dalam merancang sistem pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan yang dinamis. Secara kebijakan, penelitian ini mendukung upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola publik melalui penguatan mekanisme akuntabilitas berbasis manajemen dan teknologi.

LANDASAN TEORI

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) adalah serangkaian mekanisme, proses, dan prosedur yang dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. SPM tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga menyentuh dimensi perilaku organisasi, pengukuran kinerja, dan budaya kerja (Simons, 2018). Dalam kerangka ini, kontrol manajerial mencakup perencanaan strategis, penganggaran, evaluasi kinerja, pelaporan, hingga mekanisme insentif, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mengarahkan perilaku individu dan unit kerja agar selaras dengan tujuan organisasi. Kontrol yang efektif memungkinkan manajer untuk mengantisipasi risiko, menyesuaikan strategi dengan cepat, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan (Wijaya & Harsono, 2021).

Dalam konteks organisasi sektor publik, termasuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), sistem pengendalian manajemen menjadi semakin relevan karena organisasi ini menghadapi kompleksitas tinggi dalam pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kepada publik. Pengendalian manajemen dalam sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan internal, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kinerja, dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif (Putri & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPM sangat bergantung pada dukungan kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Ketika ketiga elemen ini berjalan sinergis, sistem pengendalian manajemen dapat menjadi fondasi kuat bagi tata kelola yang baik dan berkelanjutan di lingkungan PTNBH.

Akuntabilitas Keuangan di Sektor Publik

Akuntabilitas keuangan merupakan kemampuan suatu entitas publik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan kepada pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan pemerintah (Mardiasmo, 2018). Prinsip ini mencakup aspek transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, serta keandalan dalam pelaporan dan penggunaan anggaran.

Penelitian oleh Sari & Mustofa (2021) menyoroti bahwa akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah seringkali dipengaruhi oleh integritas individu, sistem pengawasan internal, serta ketersediaan teknologi informasi. Dalam institusi berbasis PTNBH, yang memiliki keleluasaan pengelolaan keuangan namun tetap dibawah kontrol publik, tuntutan akuntabilitas justru semakin tinggi.

Perubahan status kelembagaan menjadi PTNBH membuat pengelolaan keuangan institusi lebih kompleks: penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana abadi pendidikan, hibah luar negeri, dan belanja investasi harus dikelola dengan standar akuntabilitas yang

lebih tinggi. Maka dari itu, penting untuk menelaah bagaimana sistem pengendalian manajemen memfasilitasi peningkatan akuntabilitas di lingkungan seperti ini.

Sistem Informasi Keuangan Digital di Pemerintahan

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem keuangan digital seperti E-Budgeting, SIPPP (Sistem Informasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan) dan Promis.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2020), digitalisasi keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam penyajian data keuangan serta mendukung akuntabilitas publik. Namun, transisi ini juga memerlukan kesiapan kelembagaan dan sistem manajerial yang matang agar tidak menimbulkan kesenjangan data, kesalahan pelaporan, atau kehilangan kontrol internal.

Studi oleh Wulandari & Setiawan (2022) menekankan pentingnya integrasi antara sistem teknologi informasi dan sistem pengendalian manajemen agar digitalisasi keuangan tidak hanya menjadi alat administratif, melainkan juga sebagai bagian dari kontrol strategis organisasi.

Instansi Pemerintah Berbentuk PTNBH

PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) merupakan bentuk organisasi pemerintah yang mendapatkan otonomi dalam aspek akademik dan non-akademik, termasuk pengelolaan keuangan. Dalam struktur kelembagaan ini, kontrol terhadap efektivitas anggaran menjadi tanggung jawab internal, meskipun tetap berada dalam pengawasan negara.

Studi oleh Irawan et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun PTNBH memiliki fleksibilitas pengelolaan, kompleksitas dalam penganggaran, pelaporan, dan integrasi sistem informasi sering kali menyebabkan lemahnya pelacakan terhadap outcome keuangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian manajemen menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan akuntabilitas berjalan selaras dengan otonomi yang diberikan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) merupakan instrumen penting dalam mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi agar sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Menurut teori *Levers of Control* oleh Simons (2018), pengendalian manajerial tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk memastikan bahwa setiap unit dalam organisasi bertindak sejalan dengan misi dan nilai-nilai organisasi. Dalam konteks instansi pemerintah, di mana akuntabilitas terhadap publik menjadi fokus utama, sistem pengendalian manajemen yang efektif dapat menjembatani antara kebutuhan fleksibilitas operasional dengan tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian oleh Wijaya dan Harsono (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen yang terstruktur melalui perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan sistem pelaporan yang akurat berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di sektor publik. Hal ini diperkuat oleh studi Wibowo et al. (2020) yang menyatakan bahwa organisasi pemerintah dengan implementasi kontrol manajemen berbasis teknologi informasi dan pengawasan berlapis cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar akuntansi pemerintahan. Artinya, SPM bukan hanya soal prosedur pengendalian, melainkan mekanisme yang menciptakan sistem pelaporan yang andal, responsif terhadap risiko, serta mampu meminimalisir penyimpangan keuangan.

Lebih lanjut, dalam era digital dan desentralisasi seperti saat ini, efektivitas SPM sangat ditentukan oleh sinergi antara sistem informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Studi oleh Wulandari dan Setiawan (2022) menunjukkan bahwa integrasi sistem pengendalian manajemen dengan teknologi informasi mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan, terutama dalam instansi yang memiliki kewenangan otonom seperti PTNBH. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana peran SPM tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai kerangka strategis dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan di instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis penelian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain eksplanatori sekuensial (explanatory sequential design). Pendekatan ini mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana tahap kuantitatif dilakukan terlebih dahulu untuk mengukur hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, tahap kualitatif dilakukan untuk menggali lebih dalam proses implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan tersebut. Pendekatan ini dipilih guna memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang kompleks di instansi pemerintah berbasis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada sebuah instansi pemerintah berbasis PTNBH. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung selama enam bulan, mulai dari tahap pengumpulan data kuantitatif hingga analisis data kualitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh pegawai dan pejabat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan pengendalian manajemen di instansi tersebut, termasuk unit keuangan, perencanaan, dan pengawasan. Pada tahap kuantitatif, sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Untuk tahap kualitatif, informan dipilih secara purposif berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan pertimbangan keterwakilan peran strategis dan relevansi pengalaman. Informan kunci yang diwawancarai berjumlah 10 orang, terdiri dari manajer keuangan, auditor internal, serta pejabat pengambil keputusan terkait.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Data Kuantitatif.** Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang dirancang berdasarkan indikator variabel sistem pengendalian manajemen dan akuntabilitas keuangan. Instrumen kuesioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba awal dan analisis statistik. Responden diminta memberikan penilaian menggunakan skala Likert 1–5 terkait persepsi mereka terhadap penerapan sistem pengendalian manajemen dan tingkat akuntabilitas keuangan.
2. **Data Kualitatif.** Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang mengacu pada hasil analisis kuantitatif. Wawancara bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi sistem pengendalian manajemen, kendala, faktor

pendukung, serta dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan. Selain itu, dokumen pendukung seperti laporan keuangan, laporan pengawasan, dan prosedur pengendalian internal turut dianalisis sebagai data triangulasi.

Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial, yaitu regresi linier, untuk menguji hubungan antara variabel sistem pengendalian manajemen (variabel independen) dengan akuntabilitas keuangan (variabel dependen). Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi terbaru. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam merancang fokus dan pertanyaan wawancara pada tahap kualitatif.

Data wawancara dan dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, kemudian dilanjutkan dengan proses coding, pengelompokan tema, dan interpretasi data. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dan makna-makna yang mendalam terkait peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, serta memahami konteks organisasi dan faktor pendukung maupun penghambat implementasi.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data kuantitatif, dilakukan uji validitas konstruk, uji reliabilitas Cronbach's Alpha, serta uji asumsi klasik regresi. Sedangkan validitas data kualitatif diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan teknik pengecekan kembali (member check) kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi data.

Alur Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif untuk menguji hubungan variabel penelitian. Hasilnya menjadi dasar perancangan instrumen wawancara dan pemilihan informan pada tahap kualitatif. Selanjutnya, data kualitatif dianalisis secara mendalam untuk memberikan konteks, penjelasan, dan memperkaya pemahaman terhadap hasil kuantitatif. Kombinasi kedua data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran holistik mengenai peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah berbasis PTNBH.

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Data Kuantitatif

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen (SPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Data diperoleh dari 100 responden yang terdiri dari pejabat struktural, staf keuangan, dan auditor internal yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan efektivitas SPM akan diikuti dengan peningkatan dalam akuntabilitas keuangan instansi.

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan telah memenuhi standar kelayakan statistik dengan nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7, yang menandakan konsistensi internal yang baik dan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, hasil uji determinasi (R^2) mengungkapkan bahwa variabel sistem pengendalian manajemen mampu menjelaskan sebesar 58% variasi dalam akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah, khususnya PTNBH, yang menunjukkan kontribusi signifikan dari sistem pengendalian tersebut dalam mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Sementara itu, 42% variasi akuntabilitas keuangan yang tersisa diperkirakan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, yang mungkin meliputi

budaya organisasi, faktor lingkungan eksternal, atau variabel manajerial lain yang tidak diukur secara langsung dalam studi ini. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian manajemen sebagai salah satu kunci utama dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, namun juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang turut berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas keuangan, dengan nilai signifikansi berada di bawah angka 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara statistik, perubahan pada sistem pengendalian manajemen berdampak nyata dalam meningkatkan kemampuan instansi pemerintah, khususnya PTNBH, dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mereka. Hal ini menguatkan pentingnya keberadaan dan efektivitas mekanisme pengendalian yang sistematis sebagai fondasi utama dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas publik.

Lebih lanjut, hasil survei responden mengungkapkan bahwa beberapa komponen kunci dari sistem pengendalian manajemen sangat berperan dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan. Komponen-komponen tersebut meliputi perencanaan strategis yang matang, penganggaran berbasis kinerja yang terukur, serta penerapan sistem pelaporan keuangan digital yang modern dan responsif. Selain itu, peran pengawasan internal yang berkelanjutan juga dianggap vital dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran. Keseluruhan elemen ini secara sinergis memperkuat proses pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga instansi mampu menjalankan fungsi akuntabilitasnya secara lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Hasil Analisis Data Kualitatif

Melalui wawancara mendalam dengan pejabat keuangan, auditor internal, dan pimpinan unit akademik, ditemukan bahwa implementasi sistem pengendalian manajemen di institusi PTNBH ini telah mengalami pergeseran signifikan setelah peralihan status kelembagaan. Otonomi dalam pengelolaan keuangan membuat instansi lebih fleksibel dalam menyusun kebijakan anggaran, namun juga memperbesar risiko deviasi apabila tidak didukung dengan pengendalian yang memadai.

Integrasi antara sistem informasi keuangan digital, regulasi internal, dan audit berbasis risiko telah memberikan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan pengendalian manajemen. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada aspek budaya organisasi, keterbatasan kapasitas SDM keuangan, serta kesenjangan antara standar pengendalian dan praktik lapangan. Keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sangat berpengaruh dalam menjaga kualitas akuntabilitas, namun perlu lebih diperkuat dari sisi independensi dan pelaporan langsung kepada pimpinan tertinggi. Selain itu, peran pimpinan dalam membangun komitmen terhadap transparansi dan kontrol internal turut menjadi penentu utama keberhasilan implementasi sistem pengendalian yang efektif.

Dengan demikian, temuan kualitatif dalam penelitian ini semakin memperkuat hasil kuantitatif dengan menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis semata, melainkan juga sebagai suatu kerangka budaya organisasi yang berperan secara sistemik dalam membentuk dan menginternalisasi perilaku akuntabel di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Sistem ini mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik kerja yang mendorong kesadaran bersama akan pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya dukungan dari pimpinan, kompetensi sumber daya manusia

yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, sistem pengendalian manajemen menjadi alat strategis yang tidak hanya mengarahkan proses administratif, tetapi juga membentuk iklim organisasi yang kondusif bagi peningkatan akuntabilitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, budaya organisasi yang kuat dan terintegrasi dengan sistem pengendalian manajemen menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai akuntabilitas tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga dihayati dan diterapkan secara konsisten dalam seluruh aktivitas pengelolaan keuangan PTNBH.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen (SPM) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah yang telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan status full otonom. Temuan ini memperkuat teori Anthony dan Govindarajan (2017) yang menekankan bahwa SPM adalah mekanisme strategis dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang terintegrasi.

Secara kuantitatif, responden menilai bahwa sistem pengendalian yang efektif, terutama dalam hal penganggaran berbasis kinerja, sistem informasi keuangan, serta peran pengawasan internal telah berdampak langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil uji statistik mengonfirmasi hubungan positif dan signifikan antara variabel-variabel tersebut.

Dari sisi kualitatif, informan menyampaikan bahwa status PTNBH memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan secara mandiri. Namun, justru karena otonomi penuh tersebut, institusi menghadapi tuntutan lebih tinggi terhadap akuntabilitas publik. Dalam kondisi ini, sistem pengendalian berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai fondasi tata kelola yang menjembatani fleksibilitas pengelolaan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance.

Temuan ini menjadi relevan karena sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak membahas entitas pemerintah non-otonom. Penelitian ini menawarkan novelty dalam konteks PTNBH otonom, di mana kontrol internal, akuntabilitas, dan transparansi harus berjalan seiring dalam sistem yang relatif lebih independen dari intervensi birokrasi pusat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian akuntabilitas keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sangat bergantung pada efektivitas sistem pengendalian manajemen yang tidak hanya terstruktur dan sistematis, tetapi juga adaptif terhadap dinamika operasional serta perubahan lingkungan eksternal dan internal. Sistem pengendalian manajemen yang efektif mampu menyediakan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang transparan serta akurat, sehingga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, keberhasilan ini semakin diperkuat oleh pemanfaatan teknologi informasi yang handal dan terintegrasi, yang mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara real-time, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan. Tidak kalah pentingnya adalah peran budaya organisasi yang mengedepankan integritas, komitmen, dan nilai akuntabilitas sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas manajemen keuangan. Dengan perpaduan antara sistem pengendalian manajemen yang adaptif, teknologi informasi yang canggih, dan budaya organisasi yang kuat, PTNBH dapat secara konsisten mewujudkan akuntabilitas keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pengendalian manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah berbentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menjalankan otonomi penuh. Efektivitas sistem pengendalian manajemen meliputi proses perencanaan strategis, penganggaran yang terstruktur, pengawasan internal yang konsisten, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang andal terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam konteks PTNBH yang diberikan fleksibilitas dan kemandirian tinggi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, pengendalian manajemen menjadi jembatan vital yang menyelaraskan kebebasan operasional institusi dengan kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dan pemerintah. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai fondasi strategis yang mendukung tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur pengendalian manajemen sektor publik dengan menyoroti dinamika tata kelola keuangan yang unik di lingkungan PTNBH sektor yang relatif masih kurang dieksplorasi secara komprehensif. Dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang kompleks dan otonomi yang luas, keberhasilan sistem pengendalian manajemen juga sangat bergantung pada budaya organisasi yang sehat. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi melalui sosialisasi berkelanjutan terhadap nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi aspek krusial yang harus terus dipupuk agar sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan institusi secara optimal. Upaya ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan PTNBH berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). *Digitalisasi Keuangan Negara: Strategi Penguatan Akuntabilitas Publik melalui Teknologi Informasi*. Jakarta: BPKP.
- Dewi, R. A., & Syakhroza, A. (2020). *Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 17(1), 45–58.
- Firmansyah, R., & Wahyudi, H. (2021). *Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: Studi Empiris di Indonesia*. Jurnal Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(2), 134–149.
- Fitrani, E., & Maulana, H. (2019). *Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Instansi Pemerintah Daerah*. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 5(1), 75–88.
- Hidayat, R., & Sari, M. D. (2022). *Governance Challenges in PTNBH: Financial Autonomy and Accountability Risks*. Jurnal Manajemen dan Organisasi, 14(1), 22–35.
- Irawan, B., Suryani, T., & Maulida, N. (2023). *Tantangan Pengelolaan Keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH): Kompleksitas, Sistem Informasi, dan Akuntabilitas*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik, 7(1), 34–48.

- Kementerian Keuangan. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lestari, D. P., & Prasetyo, B. (2021). *Audit Internal dan Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Kementerian: Tinjauan Empiris*. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 12(2), 103–117.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mustika, D., Hidayati, N., & Ramadhan, F. (2021). *Kegagalan Pengendalian Internal dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Lembaga Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(2), 102–115.
- Nugroho, R., & Hasanah, I. (2023). *Mixed Methods Approach dalam Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen PTNBH*. Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi, 6(1), 54–66.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, A. P., & Wahyuni, S. (2019). *Otonomi Perguruan Tinggi dan Tantangan Penguatan Tata Kelola di Era PTNBH*. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 115–128.
- Putri, A. F., & Nugroho, R. D. (2023). *Sistem Pengendalian Manajemen di Sektor Publik: Studi pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik, 6(1), 45–58.
- Rahmawati, I., Nugroho, A., & Kusuma, T. (2020). *Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen pada Universitas Berstatus PTNBH*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 11(1), 44–59.
- Ramadani, A., & Pertiwi, S. (2022). *Tantangan Akuntabilitas Keuangan pada PTNBH di Era Digital*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Digital, 4(2), 89–101.
- Sari, R. N., & Mustofa, M. (2021). *Determinasi Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah: Peran Integritas, Sistem Pengawasan, dan Teknologi Informasi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 12(1), 25–38.
- Simons, R. (2018). *Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Siregar, H., Pramudena, A., & Dewi, L. (2020). *Evaluasi Implementasi SPIP di Lingkungan PTNBH*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(1), 55–68.
- Wibowo, A., Nurhayati, S., & Prasetya, A. (2020). *Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 11(1), 55–70.
- Wijaya, T., & Harsono, M. (2021). *Manajemen Kontrol Strategis dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Organisasi Publik*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik, 8(2), 67–79.
- Wulandari, T., & Setiawan, A. (2022). *Integrasi Sistem Informasi dan Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Digitalisasi Keuangan Publik*. Jurnal Sistem Informasi dan Akuntabilitas Publik, 5(2), 88–101.